



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA - PERUBAHAN)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

NOMOR : 000.9.2 / 57 / KesbangPol

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan daerah, administrasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3

- Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 91);
 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
 17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk tim penyusun Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dalam perumusan dan penyusunan Renja 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710502199208 1001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Peringgal.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) TAHUN 2025**

Ketua : Kepala Badan Kesbangpol
Sekertaris : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Anggota :

1. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5. Staf Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah Azza Wa Jallah yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan politik khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 01 Juli 2025

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat. Pembina Tk.I

NIP. 19710502 199208 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra OPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	35
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB. V. PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Triwulan II.....	6
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol.....	18
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025.....	23
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan KesbangPol.....	36
Tabel 3.2.	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	37
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025 dan Rumusan Rencana Tahun 2026.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2025 dan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Proses penyusunan Renja 2025 ini berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Timur dan juga Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Maksud disusunnya RENJA-PD adalah sebagai pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan peran serta berpolitik.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana kerja yang diusulkan serta jumlah dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025****2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya yakni melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dalam menjalankan urusan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar **Rp. 7.917.628.674,-** (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 2.099.853.005,-** (dua milyar sembilan puluh sembilan delapan ratus lima puluh tiga ribu lima rupiah) atau **40,90%** berdasarkan anggaran kas sampai triwulan II dan **26,52%** berdasarkan anggaran tahunan. Belum maksimalnya penyerapan anggaran khususnya berdasarkan anggaran kas dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan yang ditargetken seperti kegiatan pengadaan barang milik daerah (BMD) yang masih dalam proses belanja e-catalog; kegiatan coaching pendahuluan pengukuran indeks kerukunan umat beragama (IKUB) yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan jadwal narasumber dari LITBANG Kementerian Agama Makassar; pencairan bantuan keuangan partai politik yang juga belum terealisasi dikarenakan masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK sebagai bahan dalam rapat evaluasi bantuan keuangan partai politik untuk selanjutnya dilakukan pencairan; selanjutnya anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS yang realisasinya masih rendah dikarenakan adanya jabatan yang masih lowong pada Badan Kesbangpol. Namun secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 sampai dengan triwulan II telah terlaksana dengan baik. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan 2 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	97	3.053.809.009	81,25	557.020.580	79,75	661.704.759		-		-	40,25	1.218.725.339	41,49%	39,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	73.176.803	100	3.500.000	100	12.404.850	-	-	-	-	50,00	15.904.850	50,00%	21,73%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	42.677.500	0	3.500.000	1	7.145.200					1	10.645.200	33,33%	24,94%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2	5.518.000	0	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	2	2.637.500	1	-	-	1.751.000					1	1.751.000	50,00%	66,39%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	22.343.803	4	-	2	3.508.650					6	3.508.650	60,00%	15,70%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	2.211.392.406	100	472.311.276	100	536.510.403	-	-	-	-	50,00	1.008.821.679	50,00%	45,62%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	2.160.368.906	17	466.611.276	17	525.116.803					9	991.728.079	50,00%	45,91%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18	51.023.500	5	5.700.000	4	11.393.600	-	-	-	-	9	17.093.600	50,00%	33,50%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	18.053.000	100	1.900.000	100	4.091.000	-	-	-	-	50,00	5.991.000	50,00%	33,19%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	18.053.000	1	1.900.000	1	4.091.000					2	5.991.000	50,00%	33,19%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	72.760.000	50	5.200.000	60	11.414.500	-	-	-	-	27,50	16.614.500	27,50%	22,83%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4	41.132.000	1	5.200.000	1	9.075.000					2	14.275.000	50,00%	34,71%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	31.628.000	0	-	1	2.339.500					1	2.339.500	20,00%	7,40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	328.256.800	100	48.012.029	89,28	55.555.787		-		-	47,32	103.567.816	47,32%	31,55%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	20.270.000	1	-	1	6.160.000					2	6.160.000	50,00%	30,39%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8	89.000.000	0	-	2	2.500.000					2	2.500.000	25,00%	2,81%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4	8.608.600	1	-	1	2.945.200					2	2.945.200	50,00%	34,21%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	4	12.390.000	1	300.000	1	3.980.000					2	4.280.000	50,00%	34,54%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	60	8.040.000	15	1.260.000	15	2.090.000					30	3.350.000	50,00%	41,67%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	11.220.000	1	2.400.000	1	-					2	2.400.000	50,00%	21,39%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	178.728.200	3	44.052.029	3	37.880.587					6	81.932.616	50,00%	45,84%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100	158.750.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	29.000.000	0	-	-						0	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	38	80.650.000	0	-	-						0	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	12.000.000	0	-	-						0	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	37.100.000	0	-	-						0	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	106.670.000	100	16.637.275	100	20.482.219	-	-	-	-	50	37.119.494	50,00%	34,80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1.610.000	1	100.000	1	592.000					2	692.000	50,00%	42,98%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	43.500.000	1	8.037.275	1	7.140.219					2	15.177.494	50,00%	34,89%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	61.560.000	1	8.500.000	1	12.750.000					2	21.250.000	50,00%	34,52%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	84.750.000	100	9.460.000	65,38	21.246.000	-	-	-	-	41,35	30.706.000	41,35%	36,23%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	24.000.000	4	6.400.000	4	6.126.000					2	12.526.000	50,00%	52,19%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27	33.250.000	7	3.060.000	6	2.620.000					13	5.680.000	48,15%	17,08%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	27.500.000	0	-	1	12.500.000					1	12.500.000	50,00%	45,45%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										46,18%	39,91%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100,00	1.659.221.800	100	32.421.516	100	50.427.000			-	-	50	82.848.516	50,00%	4,99%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100	1.659.221.800	100	32.421.516	100	50.427.000	-	-	-	-	50	82.848.516	50,00%	4,99%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (orang)	112	53.928.800	-	-	-	1.611.050					-	1.611.050	0,00%	2,99%
Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka (orang)	70	1.605.293.000	-	32.421.516	-	48.815.950					-	81.237.466	0,00%	5,06%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	4,99%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan etika serta budaya politik	100	1.241.440.265	0	11.905.000	-	4.910.950	-	-	-	-	0	16.815.950	0,00%	1,35%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100	1.241.440.265	100	11.905.000	33,33	4.910.950	-	-	-	-	33,33	16.815.950	33,33%	1,35%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun (dokumen)	1	57.821.000	0	2.250.000	-	1.498.000					0	3.748.000	0,00%	6,48%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (orang)	52	1.153.922.265	0	9.655.000	-	1.372.950					0	11.027.950	0,00%	0,96%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (laporan)	4	29.697.000	1	-	1	2.040.000					2	2.040.000	50,00%	6,87%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,20%	1,35%
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100	41.120.500	28,00	4.910.000	50,93	21.813.500	-	-	-	-	50,93	26.723.500	50,93%	64,99%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawas	108	41.120.500	30	4.910.000	25	21.813.500					55	26.723.500	50,93%	64,99%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah (laporan)	4	41.120.500	1	4.910.000	1	21.813.500					2	26.723.500	50,00%	64,99%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	64,99%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	554.051.000	0	3.040.000	25	196.452.000	-	-	-	-	14	199.492.000	14,00%	36,01%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	554.051.000	0	3.040.000	100	196.452.000	-	-	-	-	25	199.492.000	25,00%	36,01%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (orang)	495	554.051.000	0	3.040.000	47	196.452.000	-	-	-	-	47	199.492.000	9,49%	36,01%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9,49%	36,01%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100	1.367.986.100	100	10.140.500	100	67.448.700	-	-	-	-	50	555.247.700	50,00%	40,59%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100	1.367.986.100	100	10.140.500	66,66	67.448.700	-	-	-	-	42	555.247.700	41,67%	40,59%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (orang)	464	185.167.100	0	7.320.500	-	60.158.200	-	-	-	-	0	67.478.700	0,00%	36,44%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (laporan)	4	26.617.500	1	2.820.000	1	7.290.500					2	10.110.500	50,00%	37,98%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	1.156.201.500	1	-	1	477.658.500					2	477.658.500	50,00%	41,31%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										43,23%	40,59%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		7.917.628.674		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										26,39%	26,52%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah

Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel Tabel 2.1 diatas dapat didefinisikan bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan secara umum dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73,176,803,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 15,904,850,- atau 31% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,211,392,406,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1,008,821,697,- atau 62,98% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18,053,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 5,991,000,- atau 54,51% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72,760,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 16,614,500,- atau 30,25% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 27,50%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328,256,800,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 103,567,816,- atau 36,61% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 47,32%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158,750,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 0,- atau 0% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 0%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106,670,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 37,119,494,- atau 76,59% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84,750,000,-

dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 30,706,000,- atau 42,92% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 41,35%.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,659,221,800,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 82,848,516,- atau 18,63% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,241,440,265,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 16,815,950,- atau 1,35% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 0%.

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,120,500,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 26,723,500,- atau 78,32% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50,93%.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 554,051,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 199,492,000,- atau 47,05% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 25%.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 1,367,986,100,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 555,247,700,- atau 74,34% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 41,67%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan indikator kinerja kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2025-2029, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2025-2029
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian						Proyeksi						Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6				7	8	9					10	11				
1	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	0%	18,18 %	27,27 %	36,36 %	54,55 %	63,64 %	73,73 %	-	-	-	-	-	-	18,18 %	27,27 %	36,36 %	54,55 %	63,64 %	73,73 %	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35 %	80,35 %	80,35 %	80,35 %	81,50 %	81,50 %	-	-	-	-	-	-	80,35 %	80,35 %	80,35 %	80,35 %	81,50 %	81,50 %	
3	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	50%	52%	54%	56%	59%	61%	63%	-	-	-	-	-	-	52%	54%	56%	59%	61%	63%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65 (BB)	70,00 (BB)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)	-	-	-	-	-	-	70,00 (BB)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)	

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Indikator dan capaian target capaian kinerja setiap tahun Badan Kesbangpol untuk tahun 2025-2029, beserta indikator kinerja, baseline tahun 2025. Tujuan utamanya adalah " Meningkatkan kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi". Untuk mencapainya, ditetapkan beberapa sasaran terukur, antara lain:

- ❖ Menurunkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) secara bertahap dari 18,18% tahun 2025 menjadi 73,73% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA dari 80,35% pada tahun 2024 menjadi 81,50% pada tahun 2029
- ❖ Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah secara bertahap dari 52% pada tahun 2025 menjadi 63% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan nilai SAKIP Kesbangpol secara bertahap dari 70 (BB) Tahun 2025 menjadi 72,50 (BB) pada tahun 2030

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, masalah-masalah yang akan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain sebagai berikut :
 - a. Belum maksimalnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat;
 - b. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta precursor narkoba
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum
 - b. Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum optimal

- c. Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
 - d. Minimnya Pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula, perempuan dan warga diwilayah terpencil
 - e. Masih rendahnya kepatuhan partai politik dalam pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :
- a. Masih terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, maupun kepentingan ekonomi dan sosial
 - b. Masih adanya sikap intoleransi serta pengaruh paham radikalisme di tengah masyarakat
 - c. Belum maksimalnya kinerja Tim PORA dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing khususnya yang bekerja disektor pertambangan dan perkebunan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan Kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Belanja Operasi				8,758,174,674		Belanja Operasi				8,758,174,674
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	3,789,876,609	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	3,789,876,609
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	67,975,803	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	67,975,803
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	36,802,500	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	36,802,500
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	3,118,000	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	3,118,000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2,637,500	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2,637,500
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	25,417,803	c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	25,417,803
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2,116,351,066	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2,116,351,066
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Ora ng	2,067,704,566	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Ora ng	2,067,704,566

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	48,646,500	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	48,646,500
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13,054,000	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13,054,000
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	13,054,000	a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	13,054,000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	100 %	67,783,000	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	100 %	67,783,000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0 -	-	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0 -	-
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	35,257,000	b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	35,257,000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	5 Orang	32,526,000	c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	5 Orang	32,526,000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	3545,911,740	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	3545,911,740

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	20,270,000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	20,270,000
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	188,000,000	b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	188,000,000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	14,289,340	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	14,289,340
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	13,390,000	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	13,390,000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	8,040,000	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	8,040,000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	16,500,000	f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	16,500,000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	285,422,400	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	285,422,400
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	761,061,000	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	761,061,000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	638,196,000	a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	638,196,000
b	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	38 Unit	103,865,000	b	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	38 Unit	103,865,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	19,000,000	c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	19,000,000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-	d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	96,770,000	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	96,770,000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1,610,000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1,610,000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	33,600,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	33,600,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	61,560,000	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	61,560,000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	120,970,000	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	120,970,000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	24,000,000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	24,000,000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	37,970,000	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	37,970,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	46,000,000	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	46,000,000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13,000,000	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13,000,000
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	1,642,396,800	II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	1,642,396,800
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	1,642,396,800	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	1,642,396,800
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	30 Orang	31,148,800	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	125 Orang	31,148,800
b	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1,611,248,000	b	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1,611,248,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1,238,202,265	III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1,238,202,265
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1,238,202,265	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1,238,202,265
a	Penyusunan program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (Orang)	1 Dok	61,121,000	a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (Orang)	1 Dok	61,121,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di daerah	52 Orang	1,153,922,265	b	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di daerah	52 Orang	1,153,922,265
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	23,159,000	c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	23,159,000
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	77,664,400	IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	77,664,400

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 Klp	77,664,400	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 Klp	77,664,400
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	77.664.400	a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	77.664.400
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	577,235,000	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	577,235,000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	100 %	577,235,000	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	100 %	577,235,000
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	575 Ora ng	577,235,000	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	575 Ora ng	577,235,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1,432,799,600	VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1,432,799,600
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	1,432,799,600	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	1,432,799,600
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	164 Orang	180,427,600	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	164 Orang	180,427,600

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	29,784,500	b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	29,784,500
C.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	1,222,587,500	C.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	1,222,587,500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, Ormas, LSM, OKP maupun dari hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari pemantauan lapangan pada pelaksanaan musrembang kecamatan. Namun secara umum tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat pada kegiatan musrembang dan forum organisasi perangkat daerah untuk tahun 2025 yang berhubungan langsung dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan social serta menjaga stabilitas politik di daerah.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, pasal 6 ayat 2 yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

- dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra, dimana **tujuan** yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029 yakni :

a. Tujuan

Tujuan Renstra adalah memberikan arah dan pedoman strategis bagi instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi melalui penetapan sasaran, strategi, serta program yang terukur dalam jangka menengah. Adapun Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi”**

b. Sasaran

Sasaran strategis Renstra adalah hasil utama yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan strategis dan arah kebijakan organisasi. Berikut ini sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 – 2029

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah
2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berikut tabel penjabaran tujuan dan sasaran rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2025

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1.Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%
		2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	80,35%
		3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	52%
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70,00 (BB)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2025 merupakan kelanjutan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024.

Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
				12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
				15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				18	Pengadaan Mebel
				19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				26	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				28	Pembentukan Paskibraka

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				30	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				31	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	13	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				36	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Dan Rumusan Rencana Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	5	6
	Belanja Operasi				8,089,528,674		9,095,693,006
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota		100 %	3,090,044,009	97 %	3,489,892,441
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	67,176,803	100 %	64,447,303
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan KesbangPol	3 Dok	36,677,500	2 Dok	27,430,500
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	2 Dok	5,518,000	2 Dok	5,218,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	2 Dok	2,637,500	2 Dok	2,150,000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan KesbangPol	10 Lap	22,343,803	10 Lap	29,648,803
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 %	2,212,283,206	100 %	2,758,649,998
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Badan KesbangPol	24 Orang	2,167,808,706	24 Orang	2,708,821,498
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Badan KesbangPol	18 Lap	45,023,500	18 Lap	49,828,500
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar		100 %	18,053,000	100 %	21,052,000
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	4 Lap	18,053,000	4 Lap	21,052,000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan		100 %	59,658,000	100 %	53,052,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
A	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Badan KesbangPol	4 Dok	32,132,000	4 Dok	26,424,000
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Badan KesbangPol	5 Orang	27,526,000	6 Orang	26,628,000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	448,254,000	100 %	361,705,640
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	20,270,000	10 Paket	10,270,000
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	11 Paket	143,000,000	7 Paket	67,000,000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	8,608,600	4 Paket	11,053,240
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	12,390,000	3 Paket	11,620,000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Dok	8,040,000	96 Dok	8,040,000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Badan KesbangPol	4 Lap	11,220,000	4 Lap	19,800,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	12 Lap	244,725,400	12 Lap	233,922,400
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi		100 %	92,650,000	100 %	37,200,000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Badan KesbangPol	3 Unit	638,196,000	0 -	-
b	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Badan KesbangPol	10 Paket	80,650,000	5 Paket	25,200,000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	3 Unit	12,000,000	6 Unit	12,000,000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	- Unit	0	- Unit	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	106,670,000	100 %	107,945,500
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	4 Lap	1,610,000	4 Lap	2,285,500
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	43,500,000	4 Lap	44,100,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	61,560,000	4 Lap	61,560,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	84,750,000	100 %	85,840,000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Badan KesbangPol	4 Unit	24,000,000	4 Unit	24,000,000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan KesbangPol	36 Unit	33,250,000	45 Unit	20,840,000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	27,500,000	1 Unit	27,500,000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	0	1 Unit	13,500,000
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan		100 %	1,642,396,800	100 %	1,659,210,100
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		100 %	1,642,396,800	100 %	1,659,210,100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Badan KesbangPol	30 Org	31,148,800	100 Orang	53,917,500
b	Pembentukan Paskibraka	Jumlah PASKIBRAKA	Badan KesbangPol	70 Org	1,611,248,000	70 Orang	1,605,292,600
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100 %	1,238,202,265	100 %	1,241,440,265
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100 %	1,238,202,265	100 %	1,241,440,265

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Badan KesbangPol	1 Dok	61,121,000	1 Dok	0
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	52 Org	1,153,922,265	30 Orang	1,153,922,265

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
C	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	23,159,000	4 Lap	29,697,000
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		100 %	77,664,400	100 %	80,000,000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		108 Klp	77,664,400	104 Klp	80,000,000
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	77,664,400	4 Lap	80,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100 %	577,235,000	100 %	180,000,000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama		100 %	577,235,000	100 %	180,000,000
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Badan KesbangPol	575 Org	577,235,000	100 Orang	180,000,000
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		84 %	1,432,799,600	95 %	535,000,000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	1,432,799,600	100 %	535,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	164 Org	180,427,600	250 Orang	490,000,000
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	29,784,500	4 Lap	45,000,000
c	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	4 Dok	1,222,587,500	4 Dok	1,260,545,500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, perubahan prioritas pembangunan, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Renja Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui dokumen ini diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan nasional dapat lebih terarah serta responsif terhadap dinamika sosial politik dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang Maju dan Sejahtera di Kabupaten Luwu Timur.

